



WALI KOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

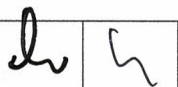
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK
NOMOR : 100.3.3.3 - 910 -2025

TENTANG

PENYEBARLUASAN DATA STATISTIK SEKTORAL DAERAH TINGKAT KOTA
SOLOK TAHUN 2020 – 2024 DALAM E-WALIDATA
SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan di daerah, perlu didukung dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
 - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah diperlukan penguatan data dan informasi untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah dilakukan pemeriksaan data statistik sektoral berbasis elektronik pada E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 391 Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 2 Tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah wajib menyediakan informasi pemerintahan daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah yang dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Solok tentang Penyebarluasan Data Statistik Sektoral Daerah Tingkat Kota Solok Tahun 2020-2024 Dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang



Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
4. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
7. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

- Memperhatikan:
1. Surat Sekretaris Jenderal a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 600.5.4/48/SJ tanggal 6 Januari 2023 hal Implementasi SIPD;
 2. Surat Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah a.n Menteri Dalam Negeri Nomor 600.3.4/11781/Bangda tanggal 13 November 2023 hal Penginputan Modul E-Walidata dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD-RI);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- KESATU : Menyebarluaskan Data Statistik Sektorial Daerah Tingkat Kota Solok Tahun 2020 – 2024 dalam E-Walidata Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
- KEDUA : Data statistik sektoral daerah tingkat Kota Solok digunakan sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Kota Solok.



KETIGA

: Daftar Data Statistik Sektoral yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Wali Kota.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 14 Juli 2025

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

u

URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Info Sub Kegiatan
1	1.02.000001	Alat uji dan kalibrasi pada RMC	Unit	0	0	0	0	0	[1.02.02.1.01.0013] [1.02.02.2.01.0015]
2	1.02.000002	Alat/Perangkat Sistem Informasi Kesehatan dan Jaringan Internet eksisting	Unit	1	1	1	1	1	[1.02.02.1.03.0003] [1.02.02.1.03.0002] [1.02.02.2.03.0003] [1.02.02.2.03.0002]
3	1.02.000004	Alkes, obat, vaksin, BMHP, makanan dan minuman yang didistribusikan ke Puskesmas serta Faskes Lainnya	Paket	1	1	1	1	1	
4	1.02.000005	Alkes/alat penunjang medik Fasyankes	Unit	148	322	117	121	360	[1.02.02.1.01.0010] [1.02.02.2.01.0014] [1.02.02.2.01.0020]
5	1.02.000008	Anak Usia Pendidikan Dasar	Orang	8206	9317	12163	12320	12.146	[1.02.02.2.02.0005]
6	1.02.000009	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Sarana	66	61	55	49	45	[1.02.04.2.01.0001]
7	1.02.000010	Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang belum memenuhi komitmen izin	Sarana	6	6	6	4	2	



BIDANG URUSAN INSPEKTORAT DAERAH

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Info Sub Kegiatan
1	6.01.000001	Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Laporan	1	1	1	1	1	[6.01.02.1.01.0001] [6.01.02.2.01.0001]
2	6.01.000002	Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Laporan	73	77	38	27	36	[6.01.02.1.01.0002] [6.01.02.2.01.0002]
3	6.01.000003	Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	Laporan	36	138	124	117	118	[6.01.02.1.01.0003] [6.01.02.2.01.0003]
4	6.01.000004	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Laporan	1	1	1	1	1	[6.01.02.1.01.0004] [6.01.02.2.01.0004]
5	6.01.000005	Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Laporan	37	34	37	31	64	[6.01.02.1.01.0005]
6	6.01.000006	Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	Kesepakatan	0	0	0	1	0	[6.01.02.1.01.0006] [6.01.02.2.01.0006]
7	6.01.000007	Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Dokumen	6	1	12	4	6	[6.01.02.1.01.0007] [6.01.02.2.01.0007]
8	6.01.000008	Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	Laporan	0	0	0	0	0	[6.01.02.1.02.0001] [6.01.02.2.02.0001]
9	6.01.000009	Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Laporan	6	9	5	4	4	[6.01.02.1.02.0002] [6.01.02.2.02.0002]
10	6.01.000010	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	8	7	8	8	[6.01.03.1.01.0001] [6.01.03.2.01.0001]
11	6.01.000011	Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan yang Disusun	Rekomendasi	4	4	4	4	4	[6.01.03.1.01.0002] [6.01.03.2.01.0002]
12	6.01.000012	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Perangkat Daerah	30	30	30	31	31	[6.01.03.1.02.0001] [6.01.03.2.02.0001]

No	Kode DSSD	Uraian DSSD	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	Info Sub Kegiatan
13	6.01.000013	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	perangkat daerah	30	30	30	31	31	[6.01.03.1.02.0002] [6.01.03.2.02.0002]
14	6.01.000014	Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Kegiatan	4	4	4	4	4	[6.01.03.1.02.0003] [6.01.03.2.02.0003]
15	6.01.000015	Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	perangkat daerah	0	0	0	0	0	[6.01.03.1.02.0004] [6.01.03.2.02.0004]
16	6.01.000020	Laporan Hasil Pengawasan Desa	Laporan					na	[6.01.02.2.01.0005]

WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA